

**Analisis Sustainability Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Surakarta**  
**Sustainability Analysis of Relocation Policy of Street Vendors in Surakarta City**

**Sri Yuliani**

Jurusan Ilmu Administrasi  
FISIP Universitas Sebelas Maret Surakarta

( diterima tanggal 30 Juni 2012, disetujui tanggal 3 Agustus 2012 )

**Abstract**

This study aims to evaluate the policy of relocating street vendors in the city of Surakarta judged from the Sustainability Governance Index (SGI), which includes indicators Status Index and the Management Index. Type of research is qualitative. Informants consisted of street vendors and street vendors associations, government agencies and officials associated with the Solo arrangement of street vendors, and local communities. Informants are determined by purposive sampling technique. The collection of data through observation techniques, in-depth interviews and focus group discussion (FGD) and data were analyzed using interactive analytical model.

The study concluded that viewed from the Status Index, relocation policy shows good results from the criteria of democracy, social and security, but weak on economic criteria and resources. Judging from Management Index, policy of relocating street vendors in the city of Solo shows good results in terms of steering capability and institutional learning indicators, but less successful in terms of policy implementation. Therefore in terms of accountability to the public considered not in favor of the interests of business continuity of street vendors.

*Keywords : analysis of sustainability, relocation policy, street vendors , status index, management index.*

**Pendahuluan**

Sektor informal merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi Indonesia. Namun, kehadirannya seringkali menimbulkan permasalahan bagi pemerintah kota manakala mereka mengokupasi ruang-ruang publik yang strategis demi kepentingan ekonomi tanpa mengindahkan aturan ketertiban. Keluhan yang timbul antara lain mulai dari penyebab kemacetan lalu lintas, mengurangi ketertiban umum, memperburuk keindahan wajah kota

hingga kerawanan sosial ekonomi. Karena itu, aksi penertiban atau penggusuran tempat usaha sektor informal, seperti pedagang kaki lima (PKL), oleh aparat kota sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kota-kota besar di Indonesia.

Di Kota Surakarta , keberadaan PKL juga menjadi dilema bagi pemerintah kota. Jumlah pedagang kaki lima di Kota Surakarta atau dikenal juga sebagai Kota Solo cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Data dari Kantor PKL Surakarta menyebutkan jika tahun 2003 tercatat hanya 3.834 PKL, hasil pendataan pada akhir 2005 meningkat 51,7 persen menjadi 5.817 PKL. Pada tahun 2007 jumlah PKL turun menjadi 3.917 dan pada tahun 2010 menurun lagi jumlahnya menjadi 2014. Penurunan jumlah PKL ini disebabkan oleh keberhasilan Pemkot Solo dalam menata PKL salah satunya adalah relokasi PKL di Monumen Banjarsari ke Pasar Klithikan Nitihardjo Semanggi. (Survey dan Pemetaan PKL Kota Surakarta Kantor Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta dan Kompas, 10 Februari 2006).

kunci keberhasilan adalah kesediaan Pemerintah Kota Surakarta untuk tidak menggunakan pendekatan kekuasaan dengan mengandalkan cara kekerasan seperti yang lazim ditempuh banyak pemerintah kota di Indonesia. Pemerintah Kota Surakarta lebih memilih cara persuasif dan pendekatan kemanusiaan.

Relokasi PKL yang telah berhasil dilaksanakan adalah relokasi PKL Monumen Banjarsari dan PKL di Jalan K.H. Dewantara atau di sepanjang jalan belakang Kampus Universitas Sebelas Maret (UNS). Proses relokasi PKL di kedua tempat tersebut dapat dikatakan berlangsung dengan baik karena hampir tanpa banyak menimbulkan gejala.

Tabel 1. Jumlah PKL per Kecamatan di Kota Surakarta Tahun 2010

No	Kecamatan	Jumlah	Persen
1	Banjarsari	521	24,76
2	Jebres	563	26,76
3	Laweyan	499	23,72
4	Pasar Kliwon	280	13,41
5	Serengan	241	11,45
	Total	2014	100

Sumber : Kantor Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta

Selama bertahun-tahun keberadaan PKL yang mengokupasi lahan publik di Kota Solo menjadi masalah yang tidak terpecahkan oleh pemerintah kota, baru pada pemerintahan Walikota Joko Widodo problem PKL dapat tertata dengan lebih terencana. Model penataan PKL di Solo banyak mendapat apresiasi karena berhasil dilaksanakan tanpa menimbulkan banyak gejala atau perlawanan dari PKL. Faktor

Untuk saat ini Pemkot Solo dapat dikatakan telah berhasil mengembalikan kebersihan lingkungan di beberapa lokasi strategis yang sebelumnya diokupasi oleh PKL.

Namun timbul persoalan baru, setelah direlokasi ternyata banyak kios yang tidak dimanfaatkan PKL. Tujuan Pemkot untuk menata atau menertibkan PKL menjadi tidak

**Sri Yuliani : Analisis Sustainability Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Surakarta**  
**Sustainability Analysis of Relocation Policy of Street Vendors in Surakarta City**

efektif. Para pedagang yang kiosnya digusur banyak yang mulai memindahkan bangunan kios atau lapaknya ke lokasi strategis lainnya . Kemudian dari pengamatan kondisi usaha PKL di lokasi yang baru dapat diketahui bahwa belum semua kios yang tersedia terisi oleh PKL. Bahkan untuk relokasi PKL belakang Kampus UNS , misalnya, di lantai dua gedung yang baru sebagian besar kios masih tutup dan dari sisi penghasilan, beberapa PKL menyatakan terjadi penurunan pendapatan yang signifikan.

Dari sisi penghasilan, beberapa PKL menyatakan terjadi penurunan pendapatan yang signifikan. Seorang PKL yang menjual jasa menjahit atau vermak jeans menyatakan “Kalau di tempat lama sehari saya bisa rata-rata dapat Rp. 50.000 per hari bahkan bisa lebih . Disini dapat seperlimanya saja sudah untung “. Sepinya usaha dagang di lokasi yang baru menyebabkan banyak PKL yang menutup usahanya atau cari lokasi baru yang dipandang lebih strategis (hasil observasi dan wawancara dengan PKL pada tanggal 14 Juli 2011).

Permasalahan yang dihadapi PKL paska relokasi menjadi faktor potensial yang dapat menghambat keberlanjutan efektivitas kebijakan penataan PKL. Sebenarnya kinerja kebijakan relokasi PKL tidak hanya dinilai dari ketercapaian output dalam arti keberhasilan menyediakan lokasi baru dan memindahkan PKL tanpa kekerasan, tapi

juga dinilai outcomes yakni sejauh mana lokasi yang baru dapat menjamin kesejahteraan PKL. Selain output dan outcomes, kinerja kebijakan relokasi PKL di Solo juga dinilai dari keberlanjutan atau *sustainability* hasil kebijakan. Ada berbagai indikator *sustainability* suatu kebijakan , salah satunya adalah pengukuran menurut Sustainability Governance Index atau SGI yang menilai sustainability suatu kebijakan dari berbagai aspek baik ekonomi, politik, sosial, keamanan maupun lingkungan. Salah satu indikator penting dari sustainability relokasi PKL adalah apakah kebijakan relokasi PKL telah mampu mencegah kemiskinan yang dapat dinilai dari sejauh mana komitmen pihak Pemkot Solo untuk terus mendampingi, memberdayakan dan memantau persoalan atau kesulitan pedagang paska penataan atau relokasi. Pemkot Solo tidak bisa lepas tangan begitu pemindahan selesai dilaksanakan. Efektivitas kebijakan relokasi PKL bagaimana pun akan banyak ditentukan dari terpenuhinya kepentingan PKL bukan semata kepentingan pemerintah. Selama kebijakan penataan tidak mempertimbangkan perspektif kepentingan PKL yang berorientasi pada kelangsungan usaha mereka, maka potensi kembali merembaknya PKL di lokasi-lokasi yang strategis akan terus terjadi.

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang masalah , maka penting untuk

dilakukan analisis keberlanjutan penataan PKL di Kota Solo, khususnya kebijakan relokasi PKL. Untuk itu penelitian ini mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut : “Apakah kebijakan relokasi PKL di Kota Surakarta, khususnya PKL di Pasar Klithikan Notoharjo dan Pasar Pangungrejo Jebres, telah mempertimbangkan aspek-aspek sustainability menurut ukuran Sustainability Governance Index (SGI) ?

## Tinjauan Pustaka

### A. Kinerja Kebijakan Publik

Penilaian terhadap kinerja suatu kebijakan merupakan bagian dari studi evaluasi kebijakan publik. Evaluasi kinerja kebijakan atau program pada dasarnya menilai sejauh mana implementasi suatu kebijakan atau program mampu mewujudkan tujuan atau hasil yang telah ditetapkan program. Implementasi kebijakan atau program secara sengaja dilaksanakan untuk meraih kinerja yang tinggi yang ditandai dengan tercapainya tujuan yaitu output ataupun outcome atau dampak yang diinginkan suatu program atau kebijakan.

Cendric Saldanha (2002) mengidentifikasi tiga indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi maupun kinerja program atau kebijakan :

#### 1. Output - Outcomes Indicators

#### 2. Efficiency – Effectiveness Indicators

#### 3. Equity – Sustainability Indicators

Outputs adalah barang dan jasa yang dihasilkan suatu departemen pemerintah atau organisasi non pemerintah. Outcomes adalah akibat-akibat yang dirasakan publik dikarenakan oleh output dan aktivitas pemerintah. Tujuan pemerintah tentunya adalah mewujudkan outcomes yang diinginkan (Scott dalam Saldanha, 2002).

Indikator efisiensi menggambarkan tingkat output (produk atau jasa yang senyatanya diberikan) oleh organisasi dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia atau menilai rasio input dan output. Indikator efektivitas menggambarkan dampak yang dirasakan konsumen setelah menerima produk atau jasa yang diberikan organisasi atau menilai rasio input dan outcomes , misalnya tingkat kepuasan konsumen (James and Roob dalam Saldanha, 2002).

Indikator keadilan (*equity*) menunjukkan distribusi output atau akses publik untuk memperoleh barang dan jasa dan kaitannya dengan keadilan dalam menerima manfaat output maupun dampak kebijakan. Indikator ini sangat penting dalam distribusi barang publik, misalnya akses penduduk desa untuk mendapatkan listrik atau pelayanan kesehatan. Indikator

keberlanjutan (*sustainability*) mengukur kemampuan suatu organisasi atau program menjamin kelestarian eksistensi dan konsistensi capaian kinerja serta kontinuitas efisiensi dan efektivitas program.

### **B. Indikator Sustainability**

Analisis sustainability kebijakan merupakan analisis yang bersifat prospektif dalam arti meramalkan masa depan kebijakan. Peramalan atau forecasting adalah prosedur membuat informasi aktual tentang situasi sosial di masa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan (Dunn dalam Riant Nugroho, 2009). Analisis prospektif dimaksudkan untuk memprediksi hal-hal atau problem yang mungkin akan terjadi dengan diimplementasikannya suatu kebijakan dan bagaimana mengantisipasi maupun cara pencegahannya (Homying, <http://www.learner.in.th/file/dpavru2/PolicyAnalysis.pdf>)

Dengan demikian, analisis sustainability kebijakan relokasi PKL dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis keberlanjutan keberhasilan kebijakan relokasi di masa datang dengan melihat dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut pada kelompok sasaran (PKL), khususnya prospek kelangsungan usaha PKL. Analisis prospek keberlanjutan program dilakukan

berdasarkan pada Sustainability Governance Indicators (SGI). SGI atau Sustainable Governance Indicators (SGI) menilai aspek governance dan policymaking dari sisi kemampuan pemerintah untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang reformatif. SGI diukur dari sisi Status Index dan Management Index.

Status Index dalam kebijakan relokasi PKL dibatasi pada indikator :

1. Demokrasi ditinjau dari sejauhmana hak-hak sipil PKL diakui dan sejauhmana terjadi proses partisipasi, dialog dan control dalam implementasi relokasi PKL.
  2. Ekonomi/pekerjaan dilihat dari sejauhmana kebijakan relokasi dapat menjawab tantangan pasar dan lapangan kerja
  3. Masalah Sosial dilihat dari apakah kebijakan relokasi PKL dapat memecahkan masalah sosial khususnya pengentasan kemiskinan
  4. Sumber Daya dilihat apakah kebijakan PKL dapat melindungi sumber daya dan kualitas lingkungan
- Adapun Management Index diukur dari :
1. Steering capability dilihat dari kemampuan untuk mengarahkan kebijakan dan menjalankan komunikasi yang efektif

2. Policy Implementation dilihat dari sejauhmana efektivitas proses implementasi kebijakan relokasi PKL dan sejauhmana tujuan kebijakan dapat diwujudkan.
3. Institutional learning dilihat sejauhmana inisiatif dan kapasitas pemerintah untuk melakukan reformasi dan memperbaharui lembaga untuk menjawab tantangan atau persoalan PKL.
4. Accountability dilihat dari sejauhmana actor-aktor non-pemerintah (warga, legislative, media massa, dan kelompok kepentingan) dilibatkan dalam kebijakan relokasi PKL

### C. Penelitian Terdahulu

Penelitian Sri Yuliani (2000) yang berjudul “*Analisis Kebijakan Penanganan Sektor Informal di Perkotaan*” menganalisis beberapa strategi penataan PKL di Perkotaan di Indonesia yaitu pengusuran, relokasi, dan program pemberdayaan melalui kredit usaha, pelatihan manajemen, dan pelembagaan koperasi. Masing-masing kebijakan dianalisis dari aspek *technical feasibility*, *administrative operability*, *economic financial viability*, *political viability*. Untuk kebijakan relokasi PKL, dari aspek teknis (mengukur tingkat *effectiveness* dan *adequacy*) merupakan alternatif kebijakan

yang mempunyai tingkat efektivitas yang tinggi dari sudut kepentingan pemerintah kota. Tapi dari sudut ‘*adequacy*’, kebijakan relokasi belum tentu mampu memecahkan persoalan yang dihadapi PKL. Karena faktor lokasi menjadi unsur yang sangat menentukan. Kalau lokasi baru dianggap kurang strategis atau dipandang dapat mengurangi jumlah pelanggan atau pendapatan, maka sebagus apapun lokasi yang disediakan akan besar kecenderungan PKL kembali ke lokasi lama atau mencari lagi lokasi lain yang strategis.

Mengenai penataan PKL di Kota Surakarta, penelitian Sri Yuliani (2006) menemukan bahwa respon atau dukungan kelompok sasaran (PKL) menjadi salah faktor yang menentukan keberhasilan penataan PKL di Kota Solo. Respon positif PKL Solo tidak lepas dari pilihan paradigma penataan PKL Pemkot Solo yaitu : menata dengan “memberi solusi tanpa menggusur” pedagang kaki lima, serta memberikan kepastian usaha dan kenyamanan tempat usaha. Paradigma ini dibuktikan dalam relokasi PKL Monumen Banjarsari ke Pasar Notoharjo Semanggi. Selama proses relokasi, pihak Pemkot Solo menggunakan pendekatan persuasif dan manusiawi yakni dengan mengajak dialog berkali-kali sehingga dicapai kesepakatan yang menguntungkan kedua pihak. Disimpulkan bahwa, respon PKL terhadap

**Sri Yuliani : Analisis Sustainability Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Surakarta**  
**Sustainability Analysis of Relocation Policy of Street Vendors in Surakarta City**

kebijakan penataan ditentukan sejauh mana suatu kebijakan itu akan berdampak pada kepentingannya yaitu kelangsungan usahanya, sehingga kebijakan penataan PKL tidak bisa dilakukan tanpa pertimbangan yang matang.

Retno Suryawati (2009) khusus meneliti efektivitas implementasi relokasi PKL belakang Kampus UNS. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan relokasi PKL belakang kampus UNS telah berhasil mencapai tujuan (output) yakni memindahkan PKL ke lokasi yang baru dan membersihkan lahan publik di belakang Kampus UNS dari PKL. Penelitian Retno Suryawati ini memfokuskan evaluasi implementasi relokasi pada tahap pra-relokasi dan tahap pelaksanaan relokasi.

Penelitian ini lebih melihat dampak paska relokasi PKL terutama dilihat dari aspek sustainability atau keberlanjutannya. Karena itu indikator kinerja kebijakan relokasi tidak hanya melihat dari sisi keberhasilan proses relokasi tapi juga prospek keberlanjutannya yang akan dinilai dari indikator-indikator yang dikembangkan oleh Sustainability Governance Index (SGI).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi kebijakan. Evaluasi dibatasi pada penilaian efektivitas kebijakan dinilai dengan

menggunakan Sustainability Governance Index (SGI) yang mengukur keberlanjutan program dari indicator Status Index dan Management Index.

Informan terdiri dari para PKL yang direlokasi, paguyuban PKL, instansi atau aparat pemerintah Kota Solo yang terkait dengan penataan PKL antara lain aparat dari Kantor PKL, serta masyarakat setempat. Pemilihan informan ditentukan dengan tehnik purposive sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan keperluan penelitian. Artinya setiap unit/individu yang diambil dari populasi dipilih dengan sengaja berdasarkan pertimbangan sumber data akan memberikan data atau informasi yang diharapkan atau diperlukan peneliti (Sugiyono, 2005). Disamping itu, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder yaitu data siap pakai yang berasal dari dokumen, arsip, peraturan pemerintah dan pernyataan atau keterangan pejabat Pemkot Solo yang diperoleh dari surat kabar, majalah, internet yang berkaitan dengan tema penelitian. Pengumpulan data primer menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam dan *focus group discussion* (FGD). Data sekunder dengan menggunakan teknik dokumen. Analisis data dilakukan dengan model analisis interaktif yang memiliki tiga komponen yakni reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992).

### **Hasil dan Pembahasan**

Penelitian ini memfokuskan pada kebijakan relokasi PKL di Monumen Banjarsari dan PKL Belakang kampus UNS dengan melihat sejauhmana pelaksanaan relokasi telah mempertimbangkan aspek sustainability. Untuk itu penting diketahui terlebih dahulu bagaimana dinamika selama proses relokasi PKL dilaksanakan di kedua lokasi tersebut.

#### **A. Relokasi PKL Monumen Banjarsari**

Kawasan sekitar Monumen 45 Banjarsari yang saat ini telah berfungsi sebagai taman kota, sebelumnya selama tahun 1900an sampai tahun 2006 diokupasi menjadi lokasi berdagang PKL yang menjual barang klithikan atau barang onderdil bekas. PKL menggelar dagangannya di sepanjang jalan di sekeliling Monumen Banjarsari bahkan meluber hingga menutupi depan rumah tinggal di sekitar Monumen yang merupakan permukiman elit. Pemerintah Kota Solo kesulitan untuk menertibkan para PKL ini, baru pada pemerintahan Jokowi-Rudy PKL di kawasan Monumen Bankjarsari berhasil direlokasi ke lokasi baru di Pasar Klithikan Notoharjo Semanggi.

Dengan dipindahkannya PKL ke Semanggi, Pemkot Solo berhasil menciptakan tata kota yang indah dan

mengembalikan kawasan Monumen Banjarsari sebagai ruang publik yang bebas dari PKL. Pemandangan PKL ke kawasan Semanggi selain untuk memberdayakan PKL juga dimaksudkan untuk menghidupkan kegiatan ekonomi di kawasan Timur Kota Solo.

Dalam menata PKL Monumen Banjarsari, Pemkot Solo membangun lokasi baru dimana PKL diberi hak untuk menempati kios secara gratis dan diberi sarana dan prasarana penunjang seperti akses jalan menuju ke lokasi, tempat parkir yang luas, taman, musola, MCK, serta bantuan kredit bergulir yang disalurkan lewat koperasi PKL. PKL juga diberi surat ijin usaha perdagangan (SIUP), tanda daftar perusahaan (TDP) dan kebutuhan perizinan usaha lainnya secara gratis dan kemudahan lainnya secara gratis dan kemudahan persyaratan pengurusan administrasi perijinan. Melalui kebijakan ini terjadi formalisasi sector informal. Karena itu, PKL yang semula berstatus illegal diwajibkan untuk memenuhi kewajiban seperti membayar retribusi ataupun kewajiban-kewajiban lainnya.

#### **B. Relokasi PKL Belakang Kampus UNS**

Penataan PKL belakang Kampus UNS dilaksanakan dengan memindahkan PKL belakang Kampus UNS ke lokasi

**Sri Yuliani : Analisis Sustainability Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Surakarta**  
**Sustainability Analysis of Relocation Policy of Street Vendors in Surakarta City**

bangunan baru berupa gedung dua lantai yang terletak di belakang Kantor Kecamatan Jebres. Cara ini sesuai dengan paradigma penataan PKL Pemkot Surakarta yaitu : menata dengan “memberi solusi tanpa menggusur “ pedagang kaki lima, serta memberikan kepastian usaha dan kenyamanan tempat usaha.

PKL di sekitar tempat pendidikan seperti Kampus UNS mempunyai konsumen yang jelas yaitu para mahasiswa, dosen atau pun pegawai kampus. Jenis dagangan yang dijual juga spesifik memenuhi kebutuhan mahasiswa. Jenis usaha yang ditawarkan PKL belakang kampus adalah kebutuhan para mahasiswa. Dari 125 kios yang terdata oleh Kantor Pengelolaan PKL hampir separonya (60 kios) adalah warung makanan. Jumlah terbanyak kedua adalah kios HP dan selular (11 kios). Sisanya merupakan jenis usaha seperti adalah toko kelontong, fotocopy, rental komputer, dan sebagainya.

Dilihat dari bentuk bangunan kios, Murtanti (2007) menyebut sebagian besar berupa kios yang mempunyai bangunan permanen dan semi permanen dengan luasan masing-masing kios sekitar 3 m sesuai dengan lebar trotoar yang ada. Sedangkan panjangnya bervariasi sesuai dengan besaran yang diinginkan pemilik atau disesuaikan dengan jenis dagangan. Ada kios yang panjangnya berkisar antara 3 m sampai 9 m.

Proses relokasi PKL belakang Kampus UNS berlangsung lancar dalam arti tidak terjadi konflik atau bentrok fisik antara aparat dengan PKL. Pada tahap pelaksanaan relokasi yang meliputi proses pembagian kios dan proses pemindahannya seperti proses penataan berlangsung tanpa gejolak. Terbukti PKL berhasil dipindahkan ke gedung baru tanpa bentrok. Pemkot Solo menggunakan pendekatan menata dengan memberi solusi tanpa menggusur karena Pemkot tidak sekedar merobohkan kios begitu saja tapi juga menggantinya dengan tempat usaha baru.

Dengan dibersihkannya kios-kios di sebelah depan Kompleks Techno Park , Pemkot Solo telah berhasil mengembalikan lahan publik ke fungsinya. Namun dinilai dari sisi tujuan memberikan kepastian dan kenyamanan usaha, kebijakan relokasi PKL belakang UNS dapat dikatakan tidak efektif. Karena ternyata tidak semua PKL mau memanfaatkan kiosnya untuk berdagang. Para pedagang enggan membuka usahanya disebabkan oleh sepiunya kondisi perdagangan di kios yang baru. Akibat sepiunya pembeli, sejumlah kios memilih tutup.

**C. Analisis Sustainability Relokasi PKL di Kota Surakarta**

Konsep *sustainability* atau sustainability menunjuk pada kapasitas

suatu kondisi atau tatanan yang mampu menjamin keberlanjutan hingga ke masa depan. Analisis sustainability dalam kebijakan relokasi PKL di Kota Solo dinilai dari keberlanjutan keberhasilan kebijakan relokasi di masa datang. Efektivitas kebijakan relokasi akan berkelanjutan kalau relokasi PKL memberi dampak positif bagi semua pihak yang berkepentingan, yaitu terjaminnya kelangsungan usaha PKL, kenyamanan warga kota dalam memanfaatkan ruang dan fasilitas publik, dan adanya tata ruang kota yang indah dan berwawasan kelestarian lingkungan. Indikator yang digunakan untuk menilai tingkat sustainability kebijakan relokasi PKL di dua lokasi terpilih mengacu pada pengukuran Sustainability Governance Indicators (SGI) yang mencakup penilaian dari kriteria Status Index dan Management Index.

### **1. Status Index**

Status Index dalam kebijakan relokasi PKL dinilai dari indikator kualitas demokrasi dan kinerja kebijakan. Kualitas demokrasi diukur dari sejauhmana implementasi kebijakan relokasi PKL mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi. Kinerja kebijakan diukur dari kemampuan kebijakan relokasi PKL memecahkan persoalan ekonomi, sosial, keamanan, dan sumber daya.

#### **a. Demokrasi**

Demokrasi ditinjau dari sejauhmana hak-hak sipil PKL diakui dan sejauhmana terjadi proses partisipasi, dialog dan kontrol dalam implementasi relokasi PKL. Penataan PKL di Kota Solo dikenal karena keberhasilannya dalam menata dan memindahkan atau merelokasi PKL secara damai tanpa banyak menimbulkan gejolak ataupun perlawanan dari PKL yang lazim terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Ada beberapa factor yang menentukan keberhasilan implementasi relokasi PKL, factor yang paling menentukan adalah kesediaan Pemkot Surakarta untuk tidak menggunakan pendekatan kekuasaan dengan mengandalkan kekerasan. Sebaliknya, Pemkot Surakarta lebih memilih cara persuasive dan pendekatan pemberdayaan PKL.

Proses mencapai kesepakatan antara Pemkot Surakarta dengan PKL tidaklah mudah. Untuk meyakinkan PKL mau direlokasi Walikota Joko Widodo harus menempuh jalan dialog hampir lima puluh kali lebih.

#### **b. Ekonomi**

Indikator ekonomi dilihat dari sejauhmana kebijakan relokasi PKL dapat menjawab tantangan pasar dan lapangan kerja. Kebijakan relokasi PKL akan berkelanjutan kalau mampu memecahkan persoalan ekonomi yang mendasar yakni menjamin tingkat penghasilan atau

**Sri Yuliani : Analisis Sustainability Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Surakarta**  
**Sustainability Analysis of Relocation Policy of Street Vendors in Surakarta City**

pendapatan PKL bahkan bisa menciptakan kondisi pasar yang kondusif dan kompetitif sehingga mampu membuka peluang-peluang kerja baru.

Ditinjau dari aspek teknis, kebijakan menetapkan lokasi baru atau relokasi PKL merupakan alternative kebijakan yang mungkin mempunyai tingkat efektivitas yang tinggi dilihat dari sudut kepentingan pemerintah kota. Tapi dari sisi *adequacy* atau kemampuan memecahkan masalah, kebijakan relokasi PKL belum tentu mampu memecahkan persoalan yang dihadapi oleh pelaku sector informal. Karena factor lokasi menjadi unsur yang sangat menentukan. Kalau lokasi baru dianggap kurang strategis atau dipandang dapat mengurangi pelanggan, maka sebagus apapun lokasi yang disediakan akan besar kecenderungan PKL kembali ke lokasi lama.

Dari sudut ekonomi, kebijakan relokasi belum tentu berdampak pada peningkatan pendapatan PKL bahkan pada awal-awal perpindahan pendapatan akan cenderung menurun, karena lokasi baru belum tentu dikenal pelanggan. Terlebih lagi kalau lokasi tersebut dari aspek transportasi tidak menguntungkan atau kalau berada di lokasi strategis PKL harus membayar pajak yang lebih tinggi yang mengakibatkan harga jual barang menjadi lebih mahal. Faktor-faktor ini dapat menyebabkan kegagalan kebijakan relokasi PKL, sehingga ada

kemungkinan dana besar yang telah dikeluarkan pemerintah kota akan mubasir.

Problem-problem di atas nampaknya dialami oleh PKL paska kebijakan relokasi. Proses relokasi PKL Monumen Banjarsari ke lokasi dagang yang baru berjalan melalui proses yang panjang. Pada mulanya PKL enggan untuk dipindahkan karena berbagai alasan antara lain keraguan pada kesungguhan pemerintah untuk memikirkan kesejahteraan PKL, lokasi di Monumen Banjarsari letaknya strategis dan sudah dikenal sebagai pasar klithikan, dan ketidakpastian usaha di lokasi baru.

Apa yang ditakutkan PKL memang terbukti pada saat awal setelah pemindahan ke Pasar Notoharjo. Sekitar satu tahun setelah pemindahan usaha PKL memang menurun. Pengalaman serupa juga dialami oleh PKL belakang Kampus UNS yang baru saja dipindahkan ke Pasar Panggungrejo di belakang Kantor Kecamatan Jebres. Dari pengamatan kondisi usaha PKL di lokasi yang baru dapat diketahui bahwa belum semua kios yang ada di dua bangunan terisi oleh PKL. Bahkan untuk lantai dua sebagian besar kios masih tutup, hanya kira-kira dua atau lima kios yang mau membuka dagangannya. Temuan senada juga ditulis Harian Joglosemar yang menyebutkan bahwa sejak diresmikan 29 Desember 2009 ternyata banyak kios yang tidak dimanfaatkan pedagang, dari 210 kios hanya sekitar 30

yang dibuka. Itupun sepi pembeli. Sukini yang membuka usaha warung makan mengeluh penghasilannya dalam sehari hanya mencapai 20 persen dari pendapatan semula sehingga ia khawatir kalau terus bertahan akan merugi (Joglosemar,4-10-2010).

Ada beberapa penyebab yang membuat kondisi di lokasi pasar yang baru sepi pembeli. Wijiatmi yang membuka usaha jahit mengatakan sepi pembeli karena posisi pasar tidak terlihat dari jalan utama jalan Ki Hajar Dewantara. Gapura masuk pasar bahkan lebih mirip gapura masuk ke kompleks perumahan (Joglosemar,4-10-2010).

Selain letaknya yang tidak strategis, desain bangunan pasar juga dituding oleh Sukir, Ketua Paguyuban PKL belakang Kampus UNS, sebagai penyebab turunnya pendapatan PKL. Arsitektur bangunan pasar dua lantai dengan luas 2 X 3 meter dianggap tidak bisa mengakomodir karakteristik PKL belakang kampus UNS yang beraneka ragam jenis usahanya. Desain gedung Pasar Pangungrejo lebih cocok untuk jenis usaha yang seragam, misalnya kios buku atau kios HP/pulsa. Gedung bertingkat dengan luas kios yang sempit tidak cocok untuk usaha warung makan yang membutuhkan air dan saluran pembuangan limbah yang memadai, atau fotocopy yang membutuhkan kapasitas listrik yang cukup besar, rental komputer

yang membutuhkan ruang yang luas, dan terlebih lagi tidak cocok atau tidak bisa digunakan sama sekali untuk usaha bengkel motor atau tambal ban.

Kondisi bangunan yang tidak mendukung usaha PKL dan jumlah pembeli yang berkurang mendorong PKL memindahkan usahanya ke lokasi yang strategis. Strategi memindahkan dagangan ke lokasi lain yang strategis ternyata menjadi pilihan hampir semua PKL lama yang direlokasi. Akibatnya, setelah PKL di belakang Kampus UNS direlokasi, yang terjadi PKL eksodus ke sebelah barat kampus atau dekat dengan Taman Jurug. Jadi dibersihkan atau ditata di satu tempat, muncul di tempat lain yang dianggap strategis.

Dari kasus relokasi PKL belakang Kampus UNS bisa disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan relokasi PKL ditentukan oleh posisi dan bentuk pasar atau gedung, serta ada tidaknya sarana dan prasarana pendukung. Posisi atau lokasi yang mudah diakses oleh pembeli dan didukung sarana transportasi akan menentukan laku tidaknya usaha PKL di tempat yang baru. Sedangkan bentuk dan luas kios yang bisa mengakomodasi jenis usaha PKL dan didukung sarana penunjang seperti listrik, air, sanitasi yang memadai akan menentukan keleluasaan PKL dalam menjalankan usahanya. Faktor-faktor ini

**Sri Yuliani : Analisis Sustainability Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Surakarta**  
**Sustainability Analysis of Relocation Policy of Street Vendors in Surakarta City**

nampaknya kurang dipertimbangkan dalam implementasi kebijakan relokasi PKL di belakang Kampus UNS Surakarta. Memang salah satu penyebab problem relokasi PKL belakang Kampus UNS adalah tidak adanya pendataan awal tentang jenis usaha dan zoning PKL.

**c. Sosial**

Masalah sosial dilihat dari apakah kebijakan relokasi PKL mampu memfasilitasi kondisi sosial yang adil dan setara serta memecahkan masalah sosial khususnya pengentasan kemiskinan. Kriteria sosial sangat penting karena sasaran kebijakan relokasi PKL kebanyakan orang miskin yang menggantungkan hidupnya dari penghasilan usahanya. Karena itu kebijakan harus mampu melindungi hak-hak orang miskin.

Dari aspek sosial, Pemkot Solo cukup mengakomodir keinginan PKL terbukti dari tidak sekedar mengusir mereka dengan cara kekerasan tapi juga mau membuka dialog sehingga tercapai kesepahaman. Dengan cara ini Pemkot Solo mampu menjaga integrasi dan kohesitas sosial komunitas PKL hingga bisa mencegah terjadinya konflik sosial. Namun, kebijakan relokasi PKL belum mampu memecahkan inti masalah social yang hendak dipecahkan yakni mengentaskan kemiskinan sebagaimana diulas dalam indikator ekonomi.

**d. Keamanan**

Keamanan (internal dan eksternal) yakni apakah kebijakan relokasi PKL dapat diterima oleh aktor-aktor politik, para pengguna/klien, dan masyarakat lainnya , serta tidak bertentangan dengan nilai yang ada dalam masyarakat sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial politik dan apakah usaha ekonomi PKL dilindungi keamanannya.

Faktor keamanan penting untuk dijadikan pertimbangan dalam merelokasi PKL, karena usaha ekonomi marjinal banyak menjadi alternative bertahan hidup masyarakat miskin sehingga setiap kebijakan yang dapat mengancam kelangsungan nafkah penghidupan mereka akan mendapatkan perlawanan mati-matian. Strategi relokasi PKL Pemkot Solo yang mengedepankan pendekatan dialogis diakui efektif dalam menata PKL di Solo sehingga mendapat apresiasi dan dukungan dari berbagai kalangan masyarakat.

Pendekatan persuasif yang ditempuh Pemkot Surakarta juga mendapat penilaian positif dari kalangan PKL. Dari kriteria keamanan, kebijakan relokasi PKL di Solo dapat dinilai berhasil meredam kerusuhan yang potensial mengganggu stabilitas keamanan warga dan kota. Karena itu, indicator keamanan ini sangat penting dipertimbangkan apabila kebijakan penataan relokasi PKL bisa berkelanjutan.

**e. Sumber Daya**

Indikator sumber daya mengukur apakah kebijakan relokasi PKL mampu memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dan melindungi lingkungan. Dari indikator sumber daya, relokasi PKL –khususnya di belakang Kampus UNS – terbukti kurang mempertimbangkan faktor efisiensi. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya PKL yang mau menempati kios pasar yang baru. Faktor penyebabnya terletak pada desain gedung yang tidak mengakomodir jenis usaha PKL dan tidak adanya zoning.

Karena pemanfaatan yang tidak maksimal, Pasar Panggunrejo sejauh ini belum mampu memberi peluang kesempatan kerja bagi lingkungan sekitarnya. Jadi adanya pasar ini belum mampu menghidupkan gerak ekonomi yang diharapkan dapat mengolah sumber daya yang ada.

Sedangkan dari sisi lingkungan, kebijakan relokasi PKL telah berhasil mengembalikan lahan public yang sebelumnya diokupasi PKL ke fungsinya semula seperti pembangunan kawasan Monumen Banjarsari sebagai taman kota dan dibangunnya trotoar di belakang tembok Kampus UNS berikut pohon-pohon yang berjajar di samping trotoar serta menghilangkan bangunan kios-kios permanen di depan Techno Park. Jadi dari sisi kelestarian lingkungan, kebijakan relokasi dinilai cukup berhasil mengembalikan fungsi lahan public dan

membangun kawasan yang ramah lingkungan.

## **2. Management Index**

### **a. Kemampuan Mengarahkan (Steering Capability)**

Steering capability dilihat dari kemampuan untuk mengarahkan kebijakan dan menjalankan komunikasi yang efektif. Strategi penataan yang umum digunakan oleh pemerintah kota di Indonesia selama ini adalah dengan cara penertiban PKL secara paksa dengan landasan penegakan hukum. Pemkot Solo tidak memilih cara konvensional semacam ini, tapi percaya betul pada senjata 'komunikasi-dialog'. Kemampuan untuk memanusiasikan manusia atau 'nguwongke uwong', mau mendengar keinginan dan kebutuhan PKL, konsep jelas yang masih bisa didialogkan, menjadi pendorong bagi pindahnya PKL Banjarsari secara damai dan elegan.

### **b. Implementasi Kebijakan**

Policy Implementation dilihat dari sejauhmana efektivitas proses implementasi kebijakan relokasi PKL dan sejauhmana tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Salah satu tujuan akhir dari penataan PKL adalah untuk mewujudkan wajah kota yang rapi, asri dan tertib. Keberhasilan Pemkot Solo memindahkan PKL di Monumen Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo dan PKL belakang Kampus UNS ke Pasar

**Sri Yuliani : Analisis Sustainability Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Surakarta**  
**Sustainability Analysis of Relocation Policy of Street Vendors in Surakarta City**

Panggungrejo dapat dikatakan telah mampu mengembalikan lahan publik yang semula ditempati PKL kembali berfungsi sebagai ruang publik.

Dilihat dari tujuan kebijakan penataan, nampaknya upaya mengembalikan tata ruang sesuai fungsinya untuk mewujudkan tata ruang kota yang harmonis juga sedikit banyak sudah terwujud terbukti sepanjang jalan belakang kampus UNS sudah bersih dari PKL dan belakang tembok UNS telah dibangun trotoar dan ditanami tanaman.

Namun indikator yang berperan penting dalam menentukan keberlanjutan efektivitas implementasi kebijakan relokasi PKL adalah permasalahan atau kesulitan yang dihadapi PKL paska relokasi dan strategi PKL untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dua hal ini akan berpengaruh pada prospek keberlanjutan usaha dagang PKL di lokasi baru.

adanya tempat (kios) usaha yang lebih baik dan status yang terjamin secara hukum ternyata tidak menjamin persoalan okupasi lahan publik di belakang Kampus UNS terselesaikan. Terbukti ditertibkan di lokasi jualan di jalan, PKL ramai-ramai berpindah membangun lapak di pinggir jalan di sebelah timur kampus UNS tepatnya di Barat Taman Jurug. Ditinjau dari faktor tujuan kebijakan, dapat dianalisis bahwa ukuran efektivitas kebijakan hanya diprioritaskan pada aspek keberhasilan

memindahkan dengan tidak menggusur PKL. Jadi efektivitas dari sisi proses memindahkan, aspek paska pemindahan kurang dipertimbangkan atau kurang diprediksi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan eksodus PKL ke lokasi yang dianggap strategis merupakan salah satu strategi bertahan hidup para PKL yang telah direlokasi ke lokasi baru. Fakta ini sekaligus menunjukkan bahwa menangani masalah PKL di perkotaan tidak bisa didekati dengan solusi yang parsial, dengan relokasi selesai. Permasalahan PKL bersumber dari akar penyebab yang kompleks untuk memecahkannya harus dengan pendekatan yang komprehensif. Solusi yang parsial, akan menghasilkan jalan keluar yang parsial.

### **c. Institutional Learning**

Institutional Learning mengukur dua indikator yakni kemampuan beradaptasi dan kapasitas melakukan reformasi atau terobosan-terobosan baru. Kebijakan relokasi PKL di Pasar Notoharjo dan Pasar Panggungrejo merupakan bentuk formalisasi PKL yang dilakukan Pemkot Solo. Tidak semua pemerintah kota mau mengambil model kebijakan ini karena selain membutuhkan dana besar juga hasilnya belum tentu efektif. Pemkot Solo berani membangun gedung pasar yang baru bagi PKL karena kreativitas dalam merancang anggaran daerah.

Langkah lain yang sering membuat Jokowi diapresiasi adalah komitmennya untuk merevitalisasi pasar-pasar tradisional di Solo. Jokowi mengungkapkan: "Selama 40 tahun saya di Solo, tidak pernah ada penambahan pasar". Padahal menurutnya, pasar tradisional merupakan hajat hidup bagi banyak orang. Baik bagi penjual maupun pembeli yang mengharapkan harga lebih murah. Tapi kondisi pasar tradisional yang kumuh, becek dan tidak nyaman tentu mengurungkan niat pembeli dan selanjutnya akan berdampak pada omset penjualan pedagang dan juga retribusi bagi PAD. Sebelum pasar dibenahi, sumbangan retribusinya terhadap PAD hanya sekitar 7 milyar. Sejak dibangun dan ditata kembali, sumbangan pasar tradisional melonjak menjadi 12 milyar pada 2008 dan 19 milyar pada 2010 ((map.ugm.ac.id).

Dari aspek institutional learning, langkah membangun pasar untuk menampung pedagang sector informal (PKL) dapat dinilai merupakan keberanian melakukan inovasi dan pemerintahan Jokowi juga berhasil melakukan inovasi dari sisi anggaran dan mampu meningkatkan pendapatan daerah melalui revitalisasi pasar tradisional.

#### **d. Akuntabilitas**

Accountability dilihat dari sejauhmana Pemkot Solo bertanggungjawab dalam proses pemberdayaan PKL paska

relokasi. Indikator akuntabilitas yang menentukan keberlanjutan efektivitas kebijakan relokasi PKL bukan sekedar diukur dari pertanggungjawaban Pemkot Solo pada dewan atau legislative atau pun masyarakat tapi terlebih tanggungjawabnya terhadap nasib PKL paska relokasi yang diukur dari ada tidaknya pendampingan dan pemberdayaan PKL, terutama pada saat-saat awal usaha di lokasi baru; adanya jaminan usaha di tempat baru dan kemandirian PKL.

Untuk pemberdayaan PKL Pasar Panggungrejo, mereka merasa setelah direlokasi tidak diperhatikan nasibnya. Kelangsungan usahanya menjadi urusan para PKL sendiri. Kenyataan ini diperkuat dengan pernyataan Suroso , salah satu dari beberapa PKL yang tetap bertahan di lokasi yang baru. Menurut Suroso , bagi Pemkot Solo yang penting adalah berhasil memberikan solusi tempat atau lokasi berdagang yang baru. Persoalan apakah di lokasi baru itu dagangannya laku apa tidak , tidak dipikirkan. Yang penting berhasil memindahkan PKL.

Keberlanjutan suatu usaha akan ditentukan sejauh mana kondisi tempat usaha memberi jaminan kepastian usaha. Kepastian usaha bisa dilihat dari apakah relokasi berdampak pada tingkat pendapatan dan jumlah pembeli. Relokasi PKL di Pasar Notoharjo maupun Pasar Panggungrejo keduanya berdampak secara signifikan pada

**Sri Yuliani : Analisis Sustainability Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Surakarta**  
**Sustainability Analysis of Relocation Policy of Street Vendors in Surakarta City**

penurunan tingkat pendapatan PKL terutama pada saat awal dipindahkan. Pada kasus di Pasar Notoharjo 1 tahun lebih setelah dipindahkan, pendapatan PKL masih belum stabil sehingga banyak pedagang yang enggan menempati kiosnya. Namun setelah beberapa tahun tingkat pendapatan pedagang baru mulai pulih meskipun belum bisa sama dengan tingkat pendapatan di lokasi semula.

Sedangkan untuk kasus relokasi PKL belakang Kampus UNS ke Pasar Panggungrejo dampak penurunan pendapat masih dirasa berat karena baru saja direlokasi sehingga butuh penyesuaian-penyesuaian ditambah lagi ada problem yang menghambat efektivitas relokasi seperti ketidaksesuaian desain gedung dengan jenis usaha PKL, belum lengkapnya sarana dan prasarana, dan letak pasar yang tidak strategis. Selama persoalan ini belum bisa dibenahi ketidakpastian usaha akan sangat tinggi.

Dinilai dari aspek akuntabilitas Pemkot Solo belum mampu memberikan pendampingan dan pemberdayaan ekonomi, jaminan kepastian usaha dan kemandirian PKL yang memadai. Khusus untuk Pasar Panggungrejo, PKL merasa hanya dibiarkan memikirkan nasibnya sendiri. Mereka merasa seperti tanaman yang dicabut dan hanya ditanam kembali tapi tidak dirawat.

### **Kesimpulan dan Saran**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan relokasi PKL Monumen Banjarsari dan relokasi PKL belakang Kampus UNS, jika ditinjau dari indicator SGI menunjukkan hasil sebagai berikut :

1. Ditinjau dari Status Index, kebijakan relokasi menunjukkan hasil yang bagus jika ditinjau dari kriteria demokrasi, sosial dan keamanan. Dari kriteria demokrasi, Pemerintah Kota Surakarta telah menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam membangun komunikasi dengan PKL sehingga kesediaan untuk dipindahkan bukan didasarkan atas paksaan tapi kesepakatan yang saling menguntungkan. Dari kriteria sosial, tidak digunakannya pendekatan kekerasan dalam relokasi PKL telah dapat menjaga keharmonisan sosial sehingga dapat mencegah potensi gangguan keamanan. Namun ditinjau dari kriteria ekonomi dan sumber daya, relokasi PKL dipandang belum mampu memberi jaminan kelangsungan usaha karena lokasi baru yang kurang strategis. Khusus untuk Pasar Panggungrejo, lesunya usaha dagang di lokasi baru juga disebabkan oleh desain gedung pasar yang tidak mengakomodasi jenis usaha PKL dan tidak adanya zoning. Karena lesunya perekonomian

menyebabkan relokasi PKL belum mampu mengolah sumber daya secara maksimal.

2. Ditinjau dari indicator Management Index, kebijakan relokasi PKL memiliki nilai lebih dilihat dari kriteria *steering capability* dan *institutional learning*. Dalam merelokasi PKL, Pemkot Solo dinilai mampu menerapkan tehnik komunikasi yang manusiawi dengan cara membangun dialog dengan PKL, sehingga kebijakan diimplementasikan atas dasar kesepakatan bersama aparat dan kelompok sasaran kebijakan. Dari kriteria *institutional learning*, Pemkot Solo juga dinilai mampu melakukan terobosan baru melalui formalisasi PKL. Namun dari kriteria implementasi kebijakan dan akuntabilitas, relokasi PKL dinilai belum berpihak pada kepentingan kelangsungan usaha PKL. Karena kebijakan relokasi baru efektif memindahkan PKL namun belum mampu memberikan jaminan usaha dan membangun kemandirian PKL.

Mengingat kebijakan relokasi PKL dinilai masih lemah dari indicator Status Index (kriteria ekonomi dan sumber daya) dan Management Index (kriteria Implementasi Kebijakan dan Akuntabilitas), maka untuk menjamin keberlanjutan efektivitas relokasi PKL disarankan agar Pemerintah Kota Surakarta ke depan lebih memfokuskan pada program atau kegiatan pemberdayaan ekonomi PKL. Untuk PKL di Pasar Notoharjo hendaknya lebih diperkuat ke fungsi kontrol dan pemantauan, karena dikhawatirkan usaha yang mulai membaik apabila mengalami gangguan akan mendorong eksodus PKL ke lokasi-lokasi lain yang dipandang strategis. Khusus untuk PKL Pasar Pangungrejo, hendaknya Pemkot Surakarta mengintensifkan usaha membenahi sarana dan prasarana pendukung untuk membangkitkan roda perekonomian. Selain itu juga perlu dilakukan evaluasi zoning agar PKL yang kesulitan menjalankan usahanya di kios yang baru dapat kembali menjalankan kegiatan ekonominya.

#### Daftar Pustaka

- Bogdan, Robert dan Taylor, Steven J. 1992. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Suatu Pendekatan Fenomenologis terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*. Usaha Nasional Surabaya.
- Homying, Wimon. *Policy Analysis*. <http://www.learner.in.th/file/dpavru2/PolicyAnalysis.pdf>
- Krueger, Richard A. 1994. *Focus groups : A Practical Guide for Applied Research*. Sage Publications. California.
- Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael . 1992. *Analisis Data Kualitatif*. UI Press. Jakarta
- Murtanti Jani Rahayu. 2007. *Kajian Karakteristik PKL Pagar Belakang*

**Sri Yuliani : Analisis Sustainability Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Surakarta**

**Sustainability Analysis of Relocation Policy of Street Vendors in Surakarta City**

- Kampus Universitas Sebelas Maret Ketingan Surakarta. Region, Vol.2 No. 1, Januari
- Retno Suryawati. 2009. *Analisis Efektivitas Kebijakan Penataan PKL di Belakang Kampus UNS Surakarta*. Laporan Penelitian PNBP LPPM UNS
- Riant Nugroho. 2009. *Public Policy*. Penerbit PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia . Jakarta
- Saldanha, Sr. Cendric . 2002. *Promoting Results Based Management in the Public Sectors of Developing Countries*. Paper presented at the Roundtable on Better Measuring, Monitoring, and Managing for Results 5-6 June 2002, World Bank, Washington, D.C..
- Sri Yuliani. 2000. Analisis Strategi Kebijakan Penataan PKL di Perkotaan . Laporan Penelitian DIPA FISIP UNS .
- . 2006. *Respon Pedagang Kaki Lima (PKL) Terhadap Kebijakan Penataan PKL di Kota Surakarta*. Laporan Penelitian DIPA FISIP UNS
- 2011. *Analisis Sustainability Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Surakarta*. Laporan Penelitian DIPA BLU FISIP UNS
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Penerbit Alfabeta. Bandung
- Sustainable Governance Indicators . <http://www.sgi-network.org/> diunduh 17 Agustus 2011
- Survey Pemetaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta. 2007. Pemkot Surakarta Kantor Pengelolaan Pasar Surakarta
- Berita Kota Solo. 8 Januari 2009. Yang namanya PKL tetep PKL, tetep harus siap digusur, harus legowo, harus sabar
- <http://quilljournal.wordpress.com/2009/01/14/ppsk-berang-tak-dilibatkan-dalam-proses-pendataan-relokasi-pkl> , diunduh 20 Juli 2006
- <http://www.tatv.co.id/20090316/pemkot-ancam-cabut-kios-pkl-belakang-kampus-uns-> -html, diunduh 20 Juli 2006
- Hubungan Civil Society dan State - <http://mapfisipuns.blogspot.com/> , diunduh 17 Agustus 2011
- Joglosemar 4-10-2010 - Puluhan Kios Tutup, Pedagang Kesal Tak Banyak Pembeli Kompas . 10 Februari 2006. Pertumbuhan PKL Capai 51,7 persen
- Kompas,24 Juli 2006. Kirab Boyong PKL, “Nguwongke Wong Cilik”. Halaman G
- Solopos 31 – 1-2011 - PPSKancam boikot program relokasi PKL Pemkot Solopos 31-5-2011 - Sompis nilai program relokasi Pemkot gagal
- Walikota The Spirit of Java Inspirasi bagi Indonesia . <http://map.ugm.ac.id/index.php/component/content/article/11-policyforum/84-walikota-the-spirit-of-java-inspirasi-bagi-indonesia> , diunduh 17 Agustus 2011

